

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa

Puti Andiny¹, Merlindiana Gus Puja Sari²

Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

¹email: putiandiny@unsam.ac.id

²email: merlindianaguspujasari@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Langsa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa. Metode Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linear berganda $\text{LogY} = 3,590 + 0,004 \text{ Log } X_1 + 0,021 \text{ Log } X_2$. Konstanta sebesar 3,590 berarti apabila pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tetap atau tidak mengalami perubahan maka indeks pembangunan manusia sebesar 3,590 persen, koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0,004. Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0,021. Dari uji t diketahui bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kota Langsa, dimana nilai t sig. pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar $0,004 < 0,05$ dan nilai t sig. pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar $0,000 < 0,05$. Dari uji F diketahui bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Langsa, dimana nilai F sig. $0,000 < 0,05$. Berdasarkan analisis koefisien determinasi diketahui bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kota Langsa sebesar 92%.

Kata Kunci: indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah

1. PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Bentuk nyata peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam hal pengelolaan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat

pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Sementara kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam hal ini diarahkan pada parameter yang sudah menjadi parameter internasional dalam hal kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor Pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam pengukuran IPM, indikator kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan, karena kesehatan serta pendidikan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia yang kemudian menunjang pembangunan di berbagai sektor akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut (Baiq, 2017).

Pendidikan dan Kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang

mendasar. Menurut Meier dan Rauch (dalam Brata, 2004) pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan *output agregat* jika modal manusia merupakan *input* dalam fungsi produksi *agregat*. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. (Septiana, Dkk. 2015)

Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan sangat erat kaitannya dengan indeks pembangunan manusia, semakin tinggi angka murid yang melanjutkan ke perguruan tinggi semakin besar peluang untuk memperoleh lapangan pekerjaan dan mempunyai keahlian sehingga berkurangnya angka pengangguran dan meningkatkan produktifitas serta mensejahterakan masyarakat. Secara umum, kualitas manusia di Kota Langsa yang diukur melalui IPM terlihat berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di Kota Langsa Tahun 2012-2016

Tahun	IPM (%)	Perkembangan (%)	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Rupiah)	Perkembangan (%)	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Rupiah)	Perkembangan (%)
2012	72.75	-	166.213.622.899,00	-	37.080.034.243	-
2013	73.40	0.89	193.066.859.642,00	16.15	78.442.109.860	111,5
2014	73.81	0.55	236.508.852.231,54	22.50	119.123.967.083	51,8
2015	74.74	1.25	258.241.831.517,00	9.18	123.508.216.120	3,68
2016	75.41	0.89	245.738.692.432,31	-4.84	169.131.384.639	36,9

Sumber : Badan Pusat statistik (BPS), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Langsa 2018.

Jika dilihat dari perkembangannya, pada tahun 2014 Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan mengalami peningkatan sangat pesat yaitu 22.50 persen dan Sektor Kesehatan pada tahun 2013 dengan nilai 111,5 persen. Sedangkan perkembangan

yang mengalami penurunan sangat drastis pada tahun 2016 yaitu 4.84 persen dan Sektor Kesehatan mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 3,68 persen. Penurunan nilai Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan disebabkan oleh adanya

perpindahan alokasi dana pendidikan untuk tingkat SMA dan SMK ke tingkat Provinsi Aceh. Sedangkan Sektor Kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan banyaknya program kesehatan yang diadakan pemerintah untuk masyarakat terutama masyarakat kurang mampu dan lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan 20% dari anggaran sektor pendidikan, dan 10% untuk sektor kesehatan, dan batas maksimal anggaran defisit 3,25% - 6,25% yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Dalam memenuhi jumlah alokasi minimal 20% dibidang pendidikan disebabkan oleh sejumlah dana yang masuk ke Kota seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membiayai kebutuhan secara teratur dan cukup besar menutup ruang bagi pemerintah untuk merealisasikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, sebagai sumber dana untuk suatu kegiatan mungkin tidak tumpang tindih atau berlipat ganda. Ini berarti bahwa suatu kegiatan mungkin hanya didanai dari sumber tunggal, tapi tidak cukup. (Abdullah. dkk, 2016)

Pergerakan perubahan IPM dari tahun ke tahun juga dinilai sebagai indikasi yang menggambarkan perubahan pembangunan manusia di suatu wilayah. Hal ini merupakan indikator untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu periode. Perubahan IPM tersebut perlu dikaji karena keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM pada suatu waktu, akan tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM-nya. Dalam rangka mencapai nilai ideal IPM yaitu 100, tentunya dibutuhkan pertumbuhan IPM yang tinggi. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM nya semakin cepat nilai IPM yang ideal tercapai. Pertumbuhan IPM Kota Langsa tahun 2014 mencapai 0,55 % yang di nilai masih rendah terhadap perkembangan IPM pada tahun berikutnya, perkembangan IPM memuncak

pada tahun 2015 yang mencapai 1,25 %. (BPS, 2018).

Berdasarkan uraian pada latar belakang, tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa.

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat – provinsi – daerah). (Lee Robert, Jr and Ronald W. Johnson, 1998)

Bigsten dan Levin, (2000) mengemukakan bahwa komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan faktor penentu dalam pembangunan manusia.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap fertilitas (angka kelahiran) masyarakat. Dengan pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan. Jadi, pada umumnya pendidikan diakui sebagai investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas.

Manfaat dari adanya pendidikan sebagai investasi pada sumber daya manusia bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari pendapat Todaro (2006) diantaranya :

1. Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, karena adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian ;
2. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas.
3. Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna mengisi jabatan-jabatan penting dalam dunia usaha maupun pemerintahan ;
4. Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan pelatihan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan dalam keahlian dan mengurangi angka buta huruf.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan suatu masyarakat. Melalui alokasi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat di Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Beberapa program yang telah dilakukan pemerintah untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan kesehatan adalah program kesehatan gratis, asuransi kesehatan, dan penggunaan kartu miskin. (Misdawita, 2013).

Pengeluaran Pemerintah untuk sektor kesehatan pada hakikatnya adalah meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan di Provinsi Aceh. Secara umum, telah terjadi perbaikan yang signifikan dalam hal ketersediaan fasilitas, utamanya di daerah-daerah yang mengalami rehabilitasi pasca tsunami. Namun hal ini tidak secara langsung dapat memperbaiki kondisi kualitas kesehatan. Bila ditelisik lebih mendalam pada anggaran pengeluaran pemerintahnya maka Pemerintah Aceh masih menggunakan paradigma sakit ketimbang paradigma sehat, hal ini ditunjukkan oleh besarnya biaya yang dikeluarkan untuk rumah sakit ketimbang alokasi untuk Dinas Kesehatan dalam upaya-upaya preventif. (Yuniver, 2009).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai salah satu tolak ukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan kehidupan yang layak (*decent standard of living*). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang mendasar yaitu usia hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek usia hidup indikatornya adalah angka harapan hidup, aspek pengetahuan indikatornya adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, aspek standar hidup layak indikatornya adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. (BPS, 2018).

Teori Indeks Pembangunan Manusia UNDP (*United Nations Development Programme*) mendefinisikan manusia pengembangan sebagai sebuah proses untuk memperluas pilihan untuk populasi. Dalam konsep ini populasi ditempatkan sebagai akhir (*ultimate end*) sedangkan upaya pengembangannya adalah dilihat sebagai sarana (sarana utama) untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat poin penting yang harus diperhatikan adalah produktivitas, keadilan, berkelanjutan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Dalam Laporan Pembangunan

Manusia (UNESCO, 2007) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan konstruksi pengukuran konsep pendekatan berbasis manusia.

Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (BPS, 2018).

Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan harus dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

pengembangan sumber daya manusia memiliki kapasitas untuk memperbesar pilihan dan kesempatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup sehat melalui keterampilan yang diperoleh dan pengetahuan yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto bangsa melalui peningkatan produktivitas. (Oluwatobi *et al.*, 2011).

Sebagaimana dikutip dari UNDP(*Human Development Report*, 1995), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah :

- a) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
- b) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja;

- c) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal;
- d) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu : produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan; dan
- e) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Langsa.

3. METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelola keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa menggunakan model ekonometrika dengan persamaan regresi linear berganda yang kemudian dimodifikasi berdasarkan variabel penelitian sebagai berikut :

$$\text{Log}Y = \alpha + \beta_0 \text{Log}X_1 + \beta_1 \text{Log}X_2 + e_i$$

Dimana :

Y = Indeks Pembangunan Manusia

α = Konstanta

β_0, β_1 = Koefisien Regresi

X_1 = Pengeluaran Pemerintah

X_2 = Sektor Pendidikan
= Pengeluaran Pemerintah
Sektor Kesehatan
 e_i = Error Terms

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), regresi Simultan (uji f) dan koefisien determinasi (R^2).

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan adalah besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBK yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran di sektor pendidikan. Anggaran Pendidikan dinyatakan dalam Jutaan rupiah pertahun.
2. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan adalah besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBK yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran di sektor kesehatan. Anggaran kesehatan dinyatakan dalam Jutaan rupiah pertahun.
3. Indeks Pembangunan Manusia adalah angka indeks komposit yang sudah dihitung oleh BPS berdasarkan formulasi yang ditetapkan UNDP, yang dinyatakan dalam persen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Pendidikan Kota Langsa

Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Pendidikan Kota Langsa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan peningkatan IPM di Kota Langsa. Untuk lebih jelasnya, peningkatan Anggaran Belanja Bidang Pendidikan Daerah Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan yang tertinggi di lihat pada tahun 2015 dengan jumlah 258.241.831.517,00 rupiah.

Tabel 3. Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Pendidikan Kota Langsa Tahun 2005 – 2016

Tahun	Belanja Bidang Pendidikan (Rupiah)	Perkembangan (%)
2005	74.021.117.200	-
2006	75.523.555.244	2,03
2007	85.943.390.057,00	13,79
2008	92.094.338.112,00	7,15
2009	103.306.488.455,00	12,17
2010	116.516.239.102,00	12,78
2011	151.460.574.613,00	29,9
2012	166.213.622.899,00	9,74
2013	193.066.859.642,00	16,15
2014	236.508.852.231,54	22,50
2015	258.241.831.517,00	9,18
2016	245.738.692.432,31	-4,84

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2018.

Sedangkan Pengeluaran Pendidikan terendah pada tahun 2005 dengan jumlah 74.021.117.200 rupiah. Jika dilihat dari perkembangannya, pada tahun 2011 Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mengalami peningkatan sangat pesat yaitu 29.9 %. Sedangkan perkembangan yang mengalami penurunan sangat drastis pada tahun 2016 yaitu 4.84%. Penurunan nilai Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan disebabkan oleh adanya perpindahan alokasi dana pendidikan untuk tingkat SMA dan SMK ke tingkat Provinsi Aceh.

Perkembangan Anggaran Bidang Kesehatan Kota Langsa

Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Kota Langsa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan peningkatan dari nilai IPM di Kota Langsa. Untuk lebih jelasnya, peningkatan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan di Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tertinggi dilihat pada tahun 2016 dengan jumlah 169.131.384.639 Rupiah. Dan Pengeluaran Pemerintah sektor

kesehatan terendah dilihat pada tahun 2010 dengan jumlah 22.806.722.100 Rupiah.

Tabel 4. Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Kota Langsa Tahun 2005 – 2016

Tahun	Belanja Bidang Kesehatan (Rupiah)	Perkembangan (%)
2005	31.842.168.364	-
2006	35.845.023.272	12,57
2007	34.236.522.473	-0,44
2008	39.646.983.574	15,80
2009	50.753.097.886	28,01
2010	22.806.722.100	-55,06
2011	41.890.108.932	83,67
2012	37.080.034.243	-11,48
2013	78.442.109.860	111,5
2014	119.123.967.083	51,8
2015	123.508.216.120	3,68
2016	169.131.384.639	36,9

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa , 2018.

Jika dilihat dari perkembangannya, Pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan tertinggi pada tahun 2013 dengan nilai 111,5%. Sedangkan perkembangan yang mengalami penurunan sangat drastis pada tahun 2007 yaitu 0,44%. Pengeluaran pemerintah Sektor kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan banyaknya program kesehatan yang diadakan pemerintah untuk masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu dan pemerintah lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah mengalokasikan sejumlah dana untuk berbagai item seperti tenaga medis, obat-obatan, puskesmas dan lain sebagainya.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa

Seperti dikemukakan sebelumnya komponen IPM terdiri dari Angka Harapan Hidup (EO), Angka Harapan Lama Sekolah (EYS), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), dan *Purchasing Power Parity* (PPP). Berdasarkan empat variabel tersebut, diperoleh indeks harapan hidup, indeks pengetahuan, dan indeks standar hidup

layak. Dari ketiga indeks ini dihasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Langsa.

Berdasarkan Tabel 5. Pencapaian IPM Kota Langsa selama periode 2012-2016 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016, angka IPM Kota Langsa sebesar 75,41 lebih tinggi dari rata-rata angka IPM Provinsi Aceh sebesar 70,00. Angka tersebut menempatkan Kota Langsa pada posisi ke tiga terbaik se- Provinsi, sama dengan posisi sebelumnya pada tahun 2015. Pencapaian ini di bawah Kota Banda Aceh dengan capaian IPM sebesar 83,73 (tertinggi se-Aceh) dan Kota Lhokseumawe sebesar 75,78.

Angka IPM Kota Langsa yang sebesar 75,41 ini menandakan besarnya angka yang harus dicapai menuju titik ideal sebesar 24,59. Kondisi ini disebabkan pembangunan manusia di seluruh aspek, bidang kesehatan yang dicerminkan oleh angka harapan hidup, bidang pendidikan yang dicerminkan oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta bidang ekonomi yang dicerminkan oleh daya beli masyarakat, berada di atas rata-rata Aceh.

Tabel 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa Tahun 2005 – 2016

Tahun	IPM (%)	Perkembangan (%)
2005	70,40	-
2006	71,51	1,57
2007	72,22	0,97
2008	72,79	0,78
2009	73,20	0,56
2010	71,79	-1,92
2011	72,15	0,50
2012	72,75	0,83
2013	73,40	0,89
2014	73,81	0,55
2015	74,74	1,25
2016	75,41	0,89

Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS) Kota Langsa, 2018.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut.

Dari Tabel 5 dapat diketahui persamaan regresi linear berganda berikut:

$$\text{LogY} = 3,590 + 0,004 \text{ Log } X_1 + 0,021 \text{ Log } X_2$$

1. Nilai konstanta sebesar 3,590 berarti apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tetap atau tidak mengalami perubahan maka IPM sebesar 3,590 persen.

2. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menunjukkan pengaruh positif terhadap IPM sebesar 0,004 artinya apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikan meningkat 1 persen maka akan terjadi peningkatan IPM di Kota Langsa sebesar 0,004 persen.
3. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan menunjukkan pengaruh positif terhadap IPM sebesar 0,021 artinya apabila pengeluaran pemerintah bidang kesehatan naik 1 persen maka akan terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Langsa sebesar 0,021 persen.

Tabel 6. Hasil Analisis Statistik

Variabel	B	T	Sig. t
Konstanta	3.590	117.586	.000
Pendidikan	.004	3.768	.004
Kesehatan	.021	6.570	.000
R Square	= .920		
F	= 51.833		
Sig. F	= .000 ^a		

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Analisis selanjutnya yaitu analisis koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat dijelaskan oleh variabel terikat. Berdasarkan Tabel 5. dapat dijelaskan bahwa nilai R Square adalah 0,920, hal ini berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia sebesar 92%.

Pengujian Hipotesis

Pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu uji t (uji parsial) dan Uji F (simultan).

a) Uji t (Parsial)

Hasil olahan data tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) di Kota Langsa dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hasil pengujian untuk variabel X_1 , dimana t_{hitung} sebesar 3.768 sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 adalah sebesar 2,160. Oleh karena itu $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3.768 > 2,160). Maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Langsa sehingga hipotesis dapat diterima.
- b. Hasil pengujian untuk variabel X_2 , dimana t_{hitung} sebesar 6.570 sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 adalah sebesar 2,160. Oleh karena itu $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6.570 > 2,160), maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa pengeluaran

pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Langsa sehingga hipotesis dapat diterima.

b) Uji F (simultan)

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui bahwa nilai probabilitas F_{hitung} yang diperoleh yaitu sebesar 0,000 atau lebih kecil dari pada 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Langsa sehingga hipotesis di terima.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah $\text{Log} Y = 3,590 + 0,004 \text{ Log } X_1 + 0,021 \text{ Log } X_2$. Konstanta sebesar 3,590, berarti apabila pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tetap atau tidak mengalami perubahan maka IPM sebesar 3,590 persen. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM di Kota Langsa.
2. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,920. Hal ini berarti variable pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mempengaruhi variabel IPM sebesar 92%.
3. Berdasarkan nilai uji t yang diperoleh, diketahui bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kota Langsa.
4. Berdasarkan nilai uji F yang diperoleh, diketahui bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor

kesehatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM Kota Langsa.

6. REFERENSI

- Abdullah, Syukriy. Dkk. 2016. The Compliance Level of Local Government to Financial Regulations On Minimum Budget Allocation Requirement and Deficit Restriction – Case of Aceh. **Proceeding of the 1st Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL)**. E-ISSN: 2549-4613.
- Abidin, Zainal. 2009. **Otonomi dan Pembangunan Daerah**. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa. 2018. **Anggaran Belanja Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Kota Langsa**. Langsa: BPKD Kota Langsa.
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa. 2018. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Langsa**. Langsa: BPS Kota Langsa.
- _____. 2018. **Kota Langsa dalam Angka**. Langsa: BPS Kota Langsa.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa. 2018. **Jumlah dana dokumen pelaksanaan anggaran**. Langsa: Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Langsa
- Dumairy. 1999. **Perekonomian Indonesia**. Jakarta: Erlangga
- Human Development Report. 1995. **Published for the united Nations Development Program (UNDP)**. New York. Oxford: Oxford University Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. **Ekonomi Pembangunan : Teori Masalah dan Kebijakan Edisi Ketiga**. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2013. **Indikator Ekonomi**. UPP STIM YKPN. Yogyakarta Universitas Diponegoro.
- Mangkoesebroto, G. 2001. **Ekonomi Publik**. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.

- Muliza, T. Zulham dkk. 2017. Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh. **Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam**. Vol. 3 No. 1.
- Sukirno, Sadono. 2007. **Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan Edisi Kedua**. Jakarta: Kencana.
- _____. 2006. **Makro Ekonomi: Teori Pengantar Edisi Ketiga**. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2006. **Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan**. Jakarta: Erlangga.